

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS,
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
SEBELUMNYA TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

KHOIRIL ANWAR
B200160329

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**

(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2018)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

KHOIRIL ANWAR

B 200 160 329

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


(Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt., M.Si.)
NIK/NIDN.657/0612056501

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP SISA LEBIH
PEMBLAYAAN ANGGARAN (SILPA)**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah publikasi ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Februari 2020

Penulis



KHOIRIL ANWAR
B200160329

**PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2018)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi khusus, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 105 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan belanja modal, dana alokasi khusus, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berpengaruh terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, SiLPA Tahun Sebelumnya, SILPA.

Abstract

This study aims to analyze the effect of capital expenditure, special allocation funds, and the remaining excess budget calculations of the previous year on the remaining budget financing of district/city regional governments in java islan in 2018. The sample use purposive sampling. The number of samples in this study were 105 regency/city governments in 2018. Data analysis use multiple linear regression to test and prove the research hypothesis. The results of this study show that capital expenditure, special allocation funds, and the excess of the previous year's budget caculation have an effect on the rest of the regency/city regional government more budget financing in java in 2018.

Keywords: Capital Expenditures, Special Allocation Fund, SiLPA of the Previous Year, SILPA.

1. PENDAHULUAN

Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba (Anarti dan Sedana, 2018:1081). Pada setiap

negara lembaga pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan tepat. Dalam kebijakan otonomi daerah peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan kemudian undang-undang tersebut direvisi kembali dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rosemarry et al. (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah bertujuan agar daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova dan Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015 dalam Antari dan Sedana, 2018). Sistem pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan, demi menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, pelayanan masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, serta terwujudnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Fauriza, Salbiah, Muda, 2018:178-179). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam pengalokasian belanja

daerah pemerintah daerah menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mencari sumber pendapatan sendiri, sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan desentralisasi pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa transfer dana daerah yang telah dianggarkan dalam APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan kepada dua hal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan daya saing.

Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah agar terwujudnya tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Penyusunan anggaran yang tepat dan baik sangat diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Fauriza, Salbiah, Muda, 2018:179). Pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). APBD merupakan alat utama pemerintah daerah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan semua kebijakannya dari rencana-rencana yang ditentukan untuk di implementasikan ke dalam tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang membayar biaya-biaya tersebut (Hasan, 2015 dalam Nuriswari, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus dilakukan secara efisien dan efektif, karena APBD memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah (Makhfatih, 2014 dalam Hardiana, 2018). Khususnya era saat ini dimana

penganggaran di Indonesia menggunakan anggaran berbasis kinerja (Bawono, 2015 dalam Hardiana, 2018). Kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat (Rondonuwu dkk, 2015 dalam Antari dan Sedana, 2018). Dapat dikatakan bahwa APBD memegang peran yang penting bagi pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan baik.

Menurut Ramadhan (2015) menyatakan bahwa jika penerimaan dan pelaksanaan APBD yang buruk akan mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan dan tidak terlaksananya program dan kegiatan sehingga menghasilkan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA/SILPA) yang tinggi pada tahun berkenaan. Permasalahan utama yang terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran di pemerintah daerah. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencerminkan adanya penyerapan dana yang tidak efektif di pemerintah daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Lemahnya APBD dapat mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai dan banyaknya program atau kegiatan pemerintah yang tidak terlaksana sehingga menimbulkan SILPA (Ramadhan, 2015 dalam Hardiana, 2018).

Menurut Ramadhan (2016) terjadinya SILPA tidak selalu menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah itu baik dalam efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi bisa terjadi karena realisasi pengeluaran atau belanja yang lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan yang terjadi karena adanya program atau kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran yang bersangkutan sehingga anggaran tidak terseap secara maksimal. Oleh karena itu terjadinya SILPA harus ditelaah lebih jauh apakah hal tersebut merupakan prestasi atau malah sebaliknya.

Adapun belanja daerah yang bersifat investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek yaitu belanja modal. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012 dalam Sugiarti dan Supadmi, 2014:478-479). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode. Syukri dan Hinaya (2019) menyatakan bahwa peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Menurut Hakim (2016) menyatakan bahwa faktor penyebab SILPA pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yaitu komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja, artinya pemerintah daerah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan belanja daerahnya, maka belanja daerah akan terealisasikan dan meminimalisir terbentuknya SILPA pada tahun anggaran.

Selain belanja daerah, pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target juga dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya SILPA, sehingga apabila pendapatan melebihi pengeluaran atau belanja akan terjadi SILPA. Faktor lainnya yaitu apabila pemerintah daerah tersebut menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu rendah tetapi sebenarnya realisasi pendapatan pemerintah daerah tersebut tinggi. Ramadhan (2015) dalam Hardiana (2018) menyebutkan bahwa realisasi pendapatan yang melampaui target dapat disebabkan karena penganggaran yang ditetapkan cenderung lebih kecil dari potensi riilnya, sehingga dengan begitu akan menghasilkan sisa banyak anggaran. Hal tersebut yang mendorong munculnya SILPA.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Khusus merupakan komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah menyatakan penentuan besaran alokasi DAK pada masing-masing daerah dihitung berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Sugiantini (2015) mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat yang melakukan transfer secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal ke daerah disinyalir menjadi penyebab realisasi DAK yang tidak mencapai target, dengan penyaluran dana yang mendekati akhir tahun maka banyak proyek yang sedang dilaksanakan tidak terealisasi atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya SILPA di daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan APBD, terlebih dahulu tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan kemudian dilanjutkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). DPA SKPD adalah pedoman bagi SKPD dalam menjalankan suatu kegiatan di pemerintah daerah. Meskipun telah berpedoman pada DPA SKPD dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi dalam penyerapan anggaran masih memungkinkan terjadinya sisa anggaran. Sisa anggaran yang dalam pemerintahan disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Fitroh dan Putra, 2016:2).

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Solikin, 2016:16). Sehingga SiLPA bisa dikatakan merupakan sumber penerimaan pembiayaan dalam

struktur APBD. Dalam monitoring dan evaluasi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2014 DJPK Kementerian Keuangan memperoleh hasil bahwa SiLPA daerah yang besar merupakan indikasi masih adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan keuangannya. SiLPA yang timbul di akhir tahun anggaran antara lain dapat berasal dari adanya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dananya tidak terserap, adanya pelampauan pendapatan, ataupun transfer pemerintah pusat ke daerah yang dilakukan mendekati akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat diserap oleh daerah dalam kegiatannya (Solikin, 2016:16). Nilai SiLPA yang sangat besar mengindikasikan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH BELANJA MODAL, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (Studi Kasus Kabupaten/Kota di pulau Jawa Tahun 2018)”.

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Sekaran (2017:109) mendefenisikan desain penelitian adalah sebagai rencana dalam mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data berdasarkan pertanyaan penelitian. Penelitian ini di desain dengan menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori yang melaui pengukuran variabel – variabel penelitian dengan dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan melihat Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018 di pulau Jawa. Data penelitian ini diakses melalui website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id> .

2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi (Nuryaman dan Christina, 2015:101). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di pulau Jawa dengan jumlah 113. Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi (Nuryaman dan Christina, 2015:101). Sampel penelitian 113 kabupaten dari 6 Provinsi yaitu, provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah purposive sampling, karena pengambilan sampel pada penelitian ini terdapat kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di pulau Jawa yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018 dan telah di audit BPK RI dan dapat diakses.
- 2) Laporan keuangan yang ditampilkan memiliki data lengkap pada tahun anggaran 2018.

2.3 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang ada di laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau yang ada di Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK RI tahun 2018. Data tersebut didapatkan dari website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>.

2.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Kurniawan (2014:73) mendefinisikan variabel sebagai suatu konsep yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menguji atas variabel yang telah dirumuskan menjadi hipotesis-hipotesis untuk memperoleh hasil analisis yang akurat. Berdasarkan permasalahan data serta hipotesis yang telah dirancang, maka variabel-variabel yang akan dianalisis adalah sebagai berikut.

2.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel Dependen Penelitian ini adalah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 menyebutkan bahwa SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Perhitungan yang digunakan adalah :

$$\text{SILPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

2.4.2 Variabel Independen

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen/terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang mempengaruhi variabel dependen yaitu:

a) Belanja Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Perhitungan yang digunakan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.} \end{aligned}$$

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa tahun anggaran 2018 yang telah diaudit. Alokasi DAK dihitung melalui dua tahap, yaitu: (1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, (2) Penentuan besarnya alokasi DAK masing-masing daerah (PP Nomor 55 Tahun 2005).

c) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; (3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan (Maulina, Nadirsyah, dan Darwanis, 2017). Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018.

Perhitungan yang digunakan adalah :

SiLPA = Realisasi Penerimaan Anggaran – Realisasi Pengeluaran Anggaran.

2.5 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mempengaruhi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Metode regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di pulau Jawa tahun anggaran 2018. Sehingga analisis regresi linier berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$SILPA = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 DAK + \beta_3 SiLPATS + e \quad (1)$$

Keterangan:

SILPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variabel independen

BM = Belanja Modal

DAK = Dana Alokasi Khusus

SILPATS = Selisi Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

e = *Error Term*

3) HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 113 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2018, Atas dasar peentuan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya maka peneliti memperoleh sampel akhir sebanyak 105 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan proses pengambilan sampel pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Proses Pengambilan Sample

Kriteria Sampel	Jumlah
Pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa tahun 2018	113
Pemerintah daerah dengan data tidak lengkap tahun 2018	(1)
Jumlah seharusnya	112
Data Outlier	(7)
Jumlah sampel akhir dalam penelitian	105

Sumber data : Data sekunder dari LKPD, 2018

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan ada beberapa data yang harus di outlier dikarena data tersebut diatas standar deviasi atau data tersebut terlalu ekstrim dan Kabupaten/Kota yang memiliki data lengkap hanya beberapa Kabupaten/Kota saja. Jadi, total sampel yang bisa diolah sejumlah 105 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Data yang sudah lengkap tersebut kemudian

dilakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut signifikan atau saling berpengaruh atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 23.0.

3.1 Pembahasan dan Hasil Analisis

3.1.1 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	54156435249	20823863868,8	2,601	0,011
	,251	92		
BM	-0,170	0,047	-3,653	0,000
DAK	0,162	0,065	2,503	0,014
SILPA TS	0,884	0,060	14,673	0,000
R	0,863			
F hitung	98,036			
R ²	0,744			
Adjusted R ²	0,737			
Sig.	0,000			

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 23.0

a) Pengujian Belanja Modal terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pengujian hipotesis pertama (H_1) dilakukan untuk menguji apakah Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Belanja Modal memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018 dan mempunyai hubungan positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Belanja Modal bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah dihimbau untuk dapat memaksimalkan penyerapan anggaran Belanja Modal. Namun pada kenyataannya Belanja Modal tidak selalu terserap maksimal di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan sisa anggaran yang berdampak pada SILPA.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Iswahyudin (2016) yang menyatakan hubungan antara belanja modal dengan SILPA berpengaruh negatif. Dikarenakan perbedaan dalam pengambilan sampel, dimana Iswahyudin (2016) menggunakan realisasi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data keseluruhan belanja modal. Jika hanya menggunakan realisasi maka terjadi perbedaan antar pemerintah daerah dan realisasi berarti jumlah uang yang dikeluarkan atau sudah dibelanjakan sehingga tidak menjadi SILPA. Hubungan positif dan signifikan terjadi karena pada saat awal pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal namun saat dialokasikan kemungkinan bisa terjadi penurunan atau efisiensi artinya anggaran lebih besar daripada realisasi maka terjadi sisa anggaran belanja modal atau perubahan positif artinya akan menambah SILPA. Namun apabila terjadi kenaikan atau penggelembungan anggaran belanja modal artinya realisasi lebih besar daripada anggaran atau perubahan negatif maka akan mengurangi SILPA.

b) Pengujian Dana Alokasi Khusus terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pengujian hipotesis kedua (H_2) dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,014 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018 dan mempunyai hubungan negatif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Izudin (2013) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara komponen-komponen pendapatan yang mencakup Dana Alokasi Khusus terhadap SILPA. Selain itu dalam penelitiannya, Sugiantini (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang tidak pernah mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karena pemerintah pusat yang melakukan transfer ke daerah secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan begitu penyaluran dana transfer yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus sehingga terbentuknya SILPA.

- c) Pengujian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pengujian hipotesis ketiga (H_3) dilakukan untuk menguji apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mempunyai pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018 dan mempunyai hubungan positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Suharna (2015) yang menyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam APBD yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara langsung berkontribusi dalam

peningkatan maupun penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

4) PENUTUP

4.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini hanya dilakukan untuk jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2018, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara baik, variabel independen yang digunakan hanya Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya, sehingga peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin sangat memengaruhi variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari pemerintahan daerah kabupaten/kota di pulau Jawa, dan penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tanpa dihubungkan dengan variabel moderating atau dengan variabel intervening.

4.3 Saran

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun saja, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen, seperti temuan audit BPK, jumlah korupsi, dan pendapatan daerah, penelitian selanjutnya perlu untuk memperluas tempat penelitian tidak hanya pemerintahan kabupaten/kota di pulau Jawa, meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antar variabel-variabel

tersebut dan dihubungkan dengan variabel moderating atau dengan variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

- Pelealu Andreas Marzel. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012* Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Desember 2013. ISSN 2303-1174
- Sudarsana Hafidh Susila 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia).*
- Aryani Putri Retno 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.*
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Rosemarry., Chinyeaka Justine., Barisua Barry. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 5 (10): 38-54.
- Halaskova, Martina and Renata Halaskova. 2016. Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Publik Services. *Journal of Local Self-Government*, 14 (3): 379397
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., Novi Budiarto. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4): 23-32.
- Halim, Abdul dan M. S. Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lucky, Dihan. 2013. *Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case*

- study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (19): 7-17.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Alexiou, Constantinos. 2009. Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research* 11(1) : 1-16.
- Abdullah, S., dan R. Rona. 2014. "Pengaruh sisa anggaran, pendapatansendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal". *IQTISHADIA (Journal of Islamic Economics and Business)* 7 (1): 179–202.
<https://doi.org/10.21043/IQTISHADIA.V7I1.1106>
- Setiyani Rita Devi 2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal studi empiris pada kabupaten/kota di Karisidenan Pati periode 2009-2013*.
- Harianto David, Adi Priyo Hari 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*.
- Sugiarthi Ni Putu Dwi Eka Rini, Supadmi Ni Luh 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014). ISSN: 2302-8556.
- Mentayani Ida, Rusmanto 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan kabupaten di pulau Kalimantan*. *Jurnal InFestasi* Vol. 9 No. 2 Desember 2013.
- Kosim Engkos 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) DAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada pemerintah kota Banjar*. *Jurnal of*

Managemen Volume 1 number 1 2017. ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E : 2579-812X.

Laksmi Ratri Paraminta, Hadi Syamsul 2013. *Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD terhadap Anggaran Pembangunan pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta periode 2007-2010*. Jurnal EKBISI, Vol. VIII, No. 1, Desember 2013. ISSN: 1907-9109.

Mustikarini Widya Astuti, Fitriarsi Debby 2008. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007*.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Undang – Undang Republik Indonesi Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah terhadap pmbangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur*. Jurnal Litbang NTT, IV-03.
- Winarni Ninuk Sri 2013. *Pengaruh Faktor-Faktor dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada pemerintahan kota Tarakan*.